

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai landasan sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus dan megatur daerahnya sendiri. Hal ini juga merupakan langkah awal yang sangat strategis bagi daerah untuk menggali, mengembangkan, mengelola aset-aset maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk membangun daerah setempat, termasuk mengamati sektor-sektor strategis seperti sumber daya yang potensial yang dapat dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang pembangunan daerah, di mana salah satunya termasuk sektor pariwisata. Pariwisata di era otonomi daerah adalah dari wujud cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yaang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi

signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara.¹

Pada saat ini kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa Negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas maupun nonmigas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa Negara dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan bagian internal dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya, yang hidup dalam bermasyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat menerapkan kaidah-kaidah :

1. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (holistic) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan objek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, kontak social dan dinamika budaya.

¹Ketut Suastika, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan, 2017), hlm. 8.

3. Penciptaan keselarasan sinergi antara kebutuhan wisatawan dan penyediaan oleh masyarakat local, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai, nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan budaya.
4. Pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan lestarnya yang pengelolaannya secara *eco-effectivity (reduce, reuse, dan recycle)* sehingga mencapai *eco-effectivity (redistribute, reactual)*.
5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

“Nampak jelas bahwa pembangunan dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.²

Dalam era otonomi daerah telah memberikan peluang bagi Kabupaten Kerinci untuk memiliki kemandirian dalam membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci masih bertumpu pada sektor Pertanian yang menyumbang sebesar 52,13 persen terhadap PDRB Kabupaten Kerinci terutama dari subsektor tanaman bahan makanan, kemudian berturut-turut sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 14,35 persen, sektor jasa-jasa sebesar 13,06 persen, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 9,41 persen, sektor konstruksi 3,81 persen, sektor industri pengolahan sebesar 3,47 persen, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan sebesar 3,40 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,86 persen serta sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 0,35 persen.³

² Waluyo & Harry. *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. Dekdip bud, Jakarta. 1993

³[http:// www.kerincikab.go.id/info/Pertumbuhan Ekonomi](http://www.kerincikab.go.id/info/Pertumbuhan_Ekonomi). diakses 11 November 2021 jam 13:00 WIB

Fondasi perekonomian di Kabupaten Kerinci masih berbasis di sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, Provinsi Jambi, mesti mencari potensi lain yang ada di Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi lain yang sangat besar dari Kabupaten Kerinci adalah menjadikan keindahan alam Kerinci sebagai objek wisata.⁴ Sektor Pariwisata belum mampu mendorong percepatan pengembangan sektor perekonomian masyarakat dan belum berkontribusi banyak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupten Kerinci. Berikut ini disajikan grafik data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Sektor Pariwisata selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1

**Rekap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Target	Jumlah Realisasi PAD	Persentase (%)
1.	2017	670.000.000	515.100.000	76,88
2.	2018	680.000.000	513.536.000	75,52
3.	2019	755.000.000	500.000.000	78,00
4.	2020	800.000.000	200.000.000	30,00
5.	2021	840.000.000	400.000.000	55,00

⁴[http:// gresnews.com/ch/Lifestyle/cl/Kerinci](http://gresnews.com/ch/Lifestyle/cl/Kerinci). Perekonomian di Kabupaten Kerinci Berbasis Pertanian, diakses 23 November jam 16:27 WIB.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kerinci mempunyai nilai PAD yang meningkat setiap tahun,⁵ namun persentase antara target dan realisasi PAD Kabupaten Kerinci belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini membuktikan bahwa kurangnya Peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Untuk PAD yang disumbangkan dari danau kerinci yaitu sekitar 10% dari sektor retribusi karcis masuk maupun parkir kendaraan.

Sejak lama Kerinci merupakan daerah tujuan wisata yang potensial di Provinsi Jambi. menjadi terkenal dengan keberadaan gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera, air terjun telun berasap dan danau gunung tujuh di kaki gunung Kerinci. Keberadaan TNKS yang merupakan paru-paru dunia, hamparan Danau Kerinci, Danau Lingkat, serta peninggalan sejarah dan keunikan seni budayanya menjadikan keindahan Kerinci semakin mempesona, rona keindahan itu semakin memancar dengan adanya air Panas Semurup dan Sungai Medang serta bukit khayangan, menjadikan bumi sakti alam Kerinci bagaikan kahyangan swarga loka. Begitu indah dan lengkapnya pesona alam di Kabupaten Kerinci sehingga muncul sebutan yang agak bombastis yaitu *“Kerinci bagaikan sekepal tanah surga di dunia”*.

Kabupaten kerinci di Provinsi Jambi telah sejak lama dikenal memiliki pariwisata yang menarik, baik wisata alam maupun buatan. Julukan *“Sakti Alam Kerinci”* rasanya tidak berlebihan diberikan kepada Kabupaten di Ujung Barat Provinsi Jambi ini, mengingat Kerinci merupakan daerah *“Sakti”* yang dapat

⁵[https://rri.co.id/jambi/daerah/798136/Kejar Target PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci LakukanP embenahan Sarana dan Prasarana Objek Wisata](https://rri.co.id/jambi/daerah/798136/Kejar%20Target%20PAD%20Dinas%20Kebudayaan%20dan%20Pariwisata%20Kerinci%20Lakukan%20Pembinaan%20Sarana%20dan%20Prasarana%20Objek%20Wisata), diakses 13 Maret 2022 jam 21:45 WIB.

memikat para pengunjung dengan keindahan alamnya. Tercatat 70% objek wisata di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, yaitu lebih dari 90 wisata alami dan buatan.⁶

Salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik utama adalah Danau Kerinci. Danau yang terletak sekitar 22 kilometer di sebelah selatan Kota Sungai Penuh ini memiliki luas kurang lebih 4.200 hektar.⁷ Danau Kerinci merupakan salah satu danau yang terkenal dengan keindahannya. Danau ini berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi, oleh karena itu danau ini bertipe vulkanik. Danau ini memiliki luas 46 km², dengan kedalaman rata-rata danau mencapai 97 m, dengan volume air 1,6 juta m³ dan berada di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Danau ini memiliki peranan yang besar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Danau kaya ikan ini dapat memberikan penghasilan bagi nelayan, airnya yang melimpah dimanfaatkan untuk pertanian, serta keindahan alamnya dijadikan objek wisata yang mempesona.

Danau Kerinci berada di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci. Danau Kerinci mempunyai pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan air di daerah sekitar Kerinci baik untuk pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat. Kawasan sekeliling Danau Kerinci pun dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi air yang menarik seperti memancing, berenang, tempat perkemahan ataupun berbagai aktivitas lain seperti

⁶BPS Kabupaten Kerinci, *Kerinci Dalam Angka 2018*(Sungai Penuh:BPS, 2018), hal.94-101

⁷*Ibid.*,hal.97.

wisata kuliner khas kabupaten kerinci yang disediakan oleh restoran-restoran yang ada di sekitar Danau Kerinci.

Danau Kerinci memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, hal ini karena danau ini memiliki pesona dan daya tarik wisata yang unik. Kawasan Objek Wisata Danau Kerinci (OWDK) resmi mulai dikembangkan pada tahun 1999 dengan pembangunan fisik objek wisata itu.

Objek Wisata Danau Kerinci (OWDK) sudah lama menjadi daya tarik wisata andalan. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, pemerintah daerah melakukan langkah promosi baik di media cetak maupun elektronik. Hal ini terbukti dengan upaya pemerintah mengelola dan mengkomersilkannya dengan berbagai upaya, termasuk mengadakan acara besar berskala nasional.⁸ Wisata Danau Kerinci sering digunakan sebagai event-event besar seperti dijadikan tempat festival Danau Kerinci, Tour The Singkarak, MTQ, dan acara-acara besar lain nya.

Pegelaran Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK) merupakan agenda nasional tahunan yang secara rutin mulai diselenggarakan sejak tahun 1999. Festival ini menampilkan atraksi seni dan budaya kerinci dan beberapa daerah lain yang terlibat. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk mengunjungi dimensi budaya, yaitu “Kepedulian” masyarakat kerinci untuk melestarikan budaya kerinci, yang pada masa sekarang mulai di tinggalkan oleh masyarakat yang sekaligus sebagai aset wisata.

⁸ Tri Maya Yulianingsih, *Jelajahi Wisata Nusantara*, (Yogyakarta: Med Press, 2010), hal 89-90.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Objek Wisata Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam Bab III Pasal 4 menjelaskan UPTD Pengelolaan Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas yaitu adalah melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pelayanan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Objek wilayah Objek wisata yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengembangan dan pembangunannya pemerintah daerah tidak hanya bekerja sendiri untuk menata atau mengembangkan Danau Kerinci melainkan bekerja sama dengan Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Pusat. Objek wisata Danau Kerinci memiliki potensi untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah ternyata belum berjalan maksimal dan menyeluruh. Objek wisata Danau Kerinci masih terdapat ramai pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan berdampak pada pengunjung dan merasa tidak nyaman ketika berwisata ke Danau Kerinci.⁹ Perawatan pada beberapa fasilitas yang ada pada objek wisata ini juga belum bagus, seperti bak sampah yang hanya ada beberapa saja, Tempat Pembuangan Sampah yang tidak memadai, sehingga tidak mampu menampung sampah, sampah yang masih banyak di temukan di tepian pinggir danau yang tidak dibersihkan, yang dapat merusak

⁹<https://gerhanaonline.net/2021/04/12/awas-pungli-di-pusat-wisata-danaukerinci-ini-tarif-resminya/>. Diakses pada 12 Desember 2021 jam 20:00 WIB

kelestarian lingkungan sekitar objek wisata Danau Kerinci.¹⁰ Padahal bea masuk di lokasi wisata ini sudah sangat tinggi, namun tidak sesuai dengan kenyamanan yang diberikan dan mengurangi minat wisatawan yang sedang liburan dan sampah yang menumpuk akan menjatuhkan citra objek wisata Danau Kerinci, Khususnya di mata wisatawan luar juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam mengembangkan Objek wisata Danau Kerinci adalah sesuatu hal yang sangat penting dan harus dikembangkan sebagai suatu daya tarik wisata dan untuk dijadikan produk wisata unggulan Kabupaten Kerinci. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci telah melakukan promosi dan pemasaran objek wisata yang ada di objek wisata Danau Kerinci. Hal ini dibuktikan dengan mengikuti berbagai macam event atau pameran-pameran untuk mempromosikan maupun pemasaran objek wisata. Selain itu Dinas Pariwisata juga telah menyebarkan brosur diberbagai tempat yang ramai agar banyak yang mengenal objek wisata Danau Kerinci itu sendiri. Hal tersebut juga dilakukan agar banyak orang yang mengetahui tentang objek wisata Danau Kerinci dan hal itu juga untuk meningkatkan kunjungan wisata dalam membantu pengembangan Kabupaten Kerinci. Tetapi dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam strategi promosi dan pemasaran ada beberapa hal yang penting salah satunya kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata mengenai objek wisata Danau Kerinci.

¹⁰<https://jambiupdate.co/artikel-wah-danau-kerinci-tercemar-sampah-plastik.html>. Diakses pada 20 Desember jam 19:30 WIB

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Lisa Putri Rahmalia, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan)” dalam penelitian tersebut penelitian dilakukan pada pemerintah Kabupaten Lampung dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada strategi pengembangan sektor pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan khususnya di bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam prespektif Ekonomi Islam. Dalam penelitiannya juga disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan sektor pariwisatanya yakni dengan menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat sekitar objek wisata dan menggunakan teknik pengembangan *carrying capacity* (daya dukung wisata). Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan, walaupun pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata tidak selalu meningkat jumlahnya. Hal ini ditandai dengan belum meratanya sarana dan prasarana yang ada dikawasan objek wisata sebagai penunjang untuk menarik minat para wisatawan serta belum diputuskannya kawasan strategi untuk daerah Kabupaten Lampung¹¹.

¹¹Lisa Putri Rahmalia, *Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan).

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan persamaan dan perbedaan. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang pengembangan objek pariwisata, dan selebihnya hampir sama dalam pengelolaan sektor pariwisata seperti pengembangan sektor wisata dan mengatasi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di wisata tersebut. Dan perbedaan yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus penelitian, yang mana fokus penelitian di atas adalah pada strategi pengembangan sektor pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan khususnya bidang pengeleloaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam prespektif Ekonomi Islam. Sedangkan fokus penelitian yang nantinya akan di tulis ialah hanya pada Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezi Kurnia Putri, mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang yang berjudul “PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) KOTA BUKITTINGGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih memfokuskan dengan melihat bagaimana pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

pemerintah Kota Bukittinggi telah berusaha melakukan pengembangan terhadap objek wisata yang terdapat di Kota Bukittinggi termasuk membuka tempat wisata baru, pengembangan pariwisata yang peneliti teliti berdasarkan teori dari Robert Chritie Mill tentang analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa sosial ekonomi, analisa bisnis, dan hukum semuanya sangat berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.¹²

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang pengembangan Objek pariwisata, dan sama- sama membahas tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata serta permasalahan yang telah terjadi dan pengelolaan sektor pariwisata yang belum termaksimal dengan baik. Dan perbedaan yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus penelitian, yang mana fokus penelitian di atas lebih memfokuskan dengan melihat bagaimana pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata. Sedangkan fokus penelitian yang nantinya akan di tulis ialah hanya pada Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten kerinci dalam pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

¹²Rezi Kurnia Putri, *Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang)

Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata pengembangan potensi pariwisata itu sendiri juga masih dilematis terhadap target yang ingin dicapai, misalnya masih adanya persoalan-persoalan seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung, minimnya fasilitas penunjang, dan pengelolaan sektor pariwisata yang belum berjalan dengan baik, sehingga campur tangan pemerintah daerah yang lebih intens sangat dibutuhkan bagi pengelolaan sektor pariwisata ini.¹³ Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci ?
2. Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci?

¹³Adi Syahfutra, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Istana Sayap Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009 -2011*”, Jurnal FISIP, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 2.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam mengembangkan Objek Wisata Danau Kerinci. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan mengembangkan Objek Wisata Danau Kerinci.
2. Dapat dijadikan salah satu atau masukan dan menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan

menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.¹⁴

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan juga merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan dengan terencana, disusun dengan matang dan terperinci.

George C. Edward III sebagaimana dalam dikutip Arifin Tahir, mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Kemudian dipertegas pula, untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwar III, menawarkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni :

- a. Komunikasi (*Communication*);
- b. Sumber Daya(*Resourches*);
- c. Sikap Pelaksana(*Dispotition*);
- d. Struktur Birokrasi(*Bureaucratic Strukture*).

Dalam prakteknya implementasi kebijakan mempunyai kedudukan penting dalam pengambilan kebijakan. Van Horn (Wahab,1997) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/penjabat –penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

¹⁴Arifin Tohir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gorontalo: Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press), hlm, 83

yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi dan menghasilkan suatu produk kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri. Proses kebijakan secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

1. Komunikasi (*Communication*)

Faktor komunikasi ini memiliki peranan penting sebagai acuan bagi implementor kebijakan agar mereka mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Disamping itu pula, komunikasi juga dapat berperan sebagai perintah dari atasan terhadap implementor kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

2. Sumber Daya(*Resourches*)

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya, sebagaimana dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan.

Faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

3. Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan.

4. Strukur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksankannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Sebagai

administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operesional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani.¹⁵

1.6. Landasan Konsep

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶

“Menurut Moeljarto, Vidhyandika yang dikutip oleh Zubaedi mengatakan salah satu peran yaitu dengan melakukan metode metode pendampingan. Pendampingan bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitas (pemandu), komunikator (penghubung), maupun dinamistator (penggerak).”¹⁷

2. Objek Wisata

Menurut M. Kesrul “Objek dan Atraksi wisata memiliki dua karakteristik yang berbeda. Asal usul dasar perbedaannya, bahwa objek atau atraksi wisata yang bersifat alami (Natural). Artinya, objek atau atraksi wisata sudah terjadi

¹⁵ *Ibid.*, hal. 108

¹⁶ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajmen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86

¹⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Bengkulu: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 59.

sebelum manusia dilahirkan atau terjadinya kondisi atau perubahan alam, contoh, gunung, pantai, hutan, dan danau. Objek atau atraksi wisata buatan manusia (manmade) serta perpaduan antara buatan manusia dan keadaan alami. Contoh pelapuhan alam cilacap, Tembok Tina, dan Candi Borobudur.

Menurut Happy Marpaung (2002) “objek wisata dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan atau aktivitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang pada suatu daerah atau tempat tertentu”. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan sematamata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai ada suatu jenis pengembangan tertentu. Misalnya penyediaan aksesibilitas dan fasilitas. Oleh karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, investarisasi, dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan suatu area tertentu. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan.¹⁸

3. Pengembangan

Menurut Seels & Richey pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rencana dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pelajaran, pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya ada analisis kebutuhan tetapi itu juga pada

¹⁸Jurnal, Dea Pertiwi, *Peran Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata Di Dearah Kabupaten Kutai Timur*. Ejournal Ilmu Pemerintahan 2015,3(2): 1070-1082.Diakses pada 25 Oktober 2021

isu-isu luas tentang analisis awal dan akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temua-temuan uji lapangan. Menurut Andi Mappi Sammeng “kata pengembangan nampaknya mempunyai makna dan interpretasi yang berbeda, bukan hanya antar Negara juga antar perorangan”. Pengembangan mengisyarakan suatu proses revolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya tidak jalan di tempat.

”Artinya kesimpulan penjelasan pengembangan diatas adalah proses atau cara yang menjelaskan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna dan berguna bagi Negara maupun perorangan.”¹⁹

4. Pariwisata

Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 20004 tentang pemerintahan yang memberikan otonomi penuh kepada daerah memungkinkan daerah menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah daerah yang serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Disisi lain memberikan kewenangan penuh kepada kepada daerah untuk melakukan penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada didaerahnya. Kewenangan tersebut antara lain adalah berupa pembinaan dan pengembangan potensi pariwisata.²⁰

Sedangkan menurut Suwanto istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata yaitu “sebagai sesuatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan danbukan untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan upah dengan demikian dapat dikatakan

¹⁹Jurnal. Sariladia Retvany. *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata DiKabupaten Malinau (Studi Kasus Desa Wisata Setulang)* ISSN.2337-8670, ejournal.Pin.Or.id 6 Februari 2019. Hlm 69

²⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu”.²¹

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.²²

1.7. Kerangka Pikir

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan daerah wisata sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009, bertujuan untuk meningkatkan

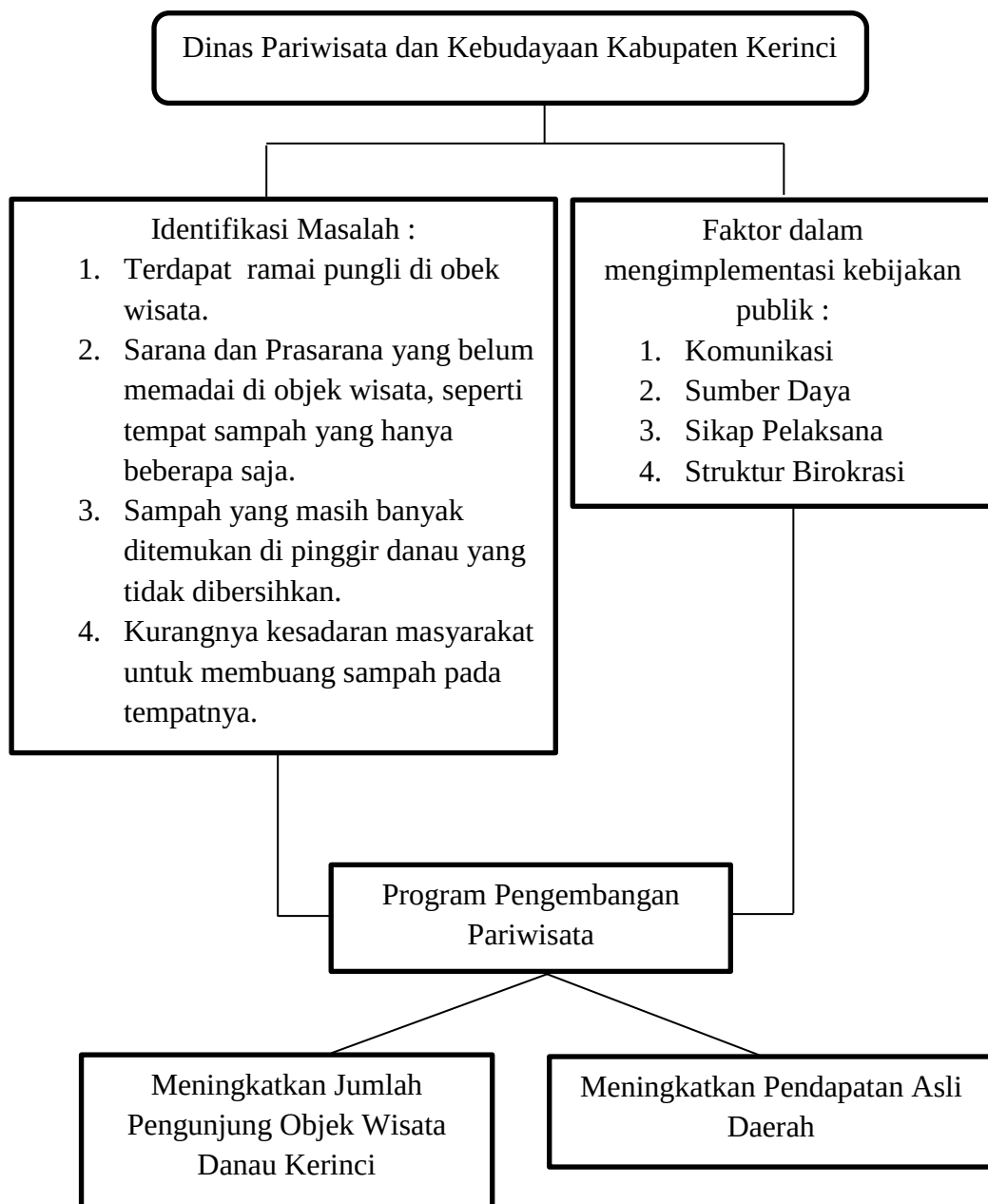
²¹Jurnal, Dea Pertiwi, *Peran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur*, hlm. 1071

²²Jurnal, Abid Muhtarom, *Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015*, hlm, 660-661

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa, mengembangkan pariwisata harus dilakukan secara komprehensif-integral melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau yang lebih akrab dikenal dengan *Community-Based Tourism development*.²³

²³Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Rumusan Kerangka Pikir



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya. Ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yaitu perawatan pada beberapa fasilitas yang

ada pada objek wisata, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti tempat sampah yang hanya ada beberapa saja, sampah yang masih banyak di temukan di tepian pinggir danau yang tidak di bersihkan yang dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar objek wisata Danau Kerinci, selain itu kurang nya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan masih terdapat ramai pungli di objek wisata ini. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan melakukan pengembangan wisata Danau Kerinci diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁴

Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pendekatannya memakai pendekatan deskriptif. Metode

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 2.

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan mengenai kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam menjelaskan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di rencanakan akan dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci serta lembaga-lembaga yang terkait lainnya yang penulis harapkan dapat membantu dan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau *informant*. Adapun data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data hasil

²⁵*Ibid.*, hlm. 9.

wawancara langsung yang berasal dari informan yang berkenaan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Kerinci Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain.²⁶ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci maupun bahan perpustakaan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan) dan teknik penentuan yang di gunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci

²⁶Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), hlm. 113.

- b. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci
- c. Kepala Sub Bidang Pariwisata Kabupaten Kerinci
- d. Penanggung jawab pengelolaan sektor wisata Danau Kerinci
- e. Tokoh masyarakat (Kepala Desa)

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.²⁷ Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dengan pasti persoalan-persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, rencana wawancara ini ditujukan kepada :

- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci
- Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci
- Kepala Sub Bidang Pariwisata Kabupaten Kerinci
- Masyarakat Setempat

²⁷*Ibid.*, hlm. 125.

- Kepala Desa

b. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.²⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian, lalu ditelaah sehingga dokumentasi tersebut dapat mendukung serta menambah pembuktian penelitian di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

²⁸*Ibid.*, hlm. 132.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.244.

Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang di peroleh dalam proses pengumpulan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah proses analisis data atau informan yang kemudian berakhir pada kesimpulan penelitian.

6. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁰

³⁰*Ibid.*, hlm. 241.